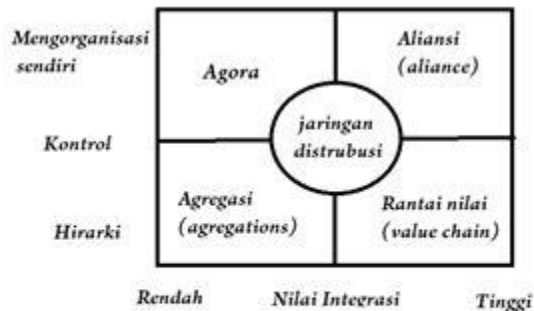


## MODEL TIPOLOGI BISNIS

Nama : Muhammad Irham Maula

NIM : 054084858



Berikut ini adalah beberapa contoh tipologi model bisnis berdasarkan berbagai aspek:

Berdasarkan Value Proposition

- Model Bisnis Berbasis Produk: menghasilkan pendapatan dari penjualan produk fisik. Contoh: perusahaan retail, makanan & minuman.
- Model Bisnis Berbasis Layanan: menghasilkan pendapatan dari penyediaan jasa/layanan. Contoh: konsultan, jasa kebersihan.
- Model Bisnis Berbasis Konten: menghasilkan pendapatan dari konten digital seperti video, musik, gambar. Contoh: Netflix, Spotify(JOGIYANTO, 2024).

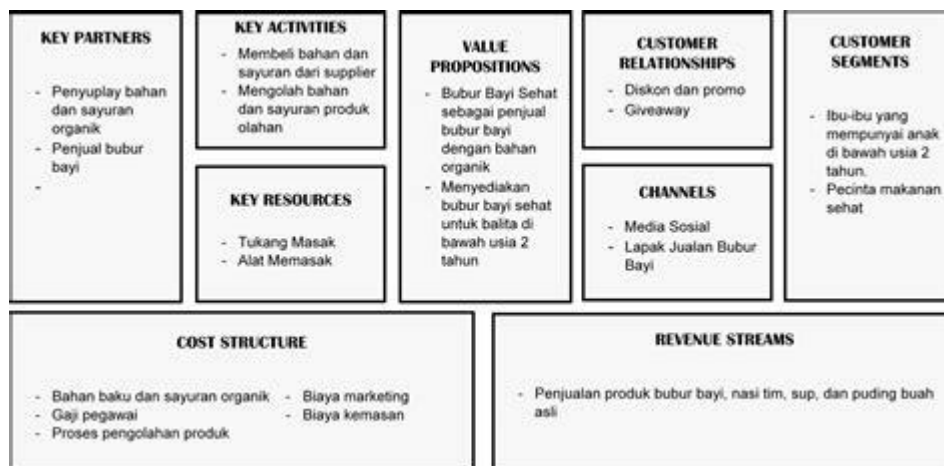
Berdasarkan Aliran Pendapatan

- Model Bisnis Berlangganan: pelanggan membayar biaya berlangganan secara rutin. Contoh: Netflix, gym.
- Model Bisnis Iklan: menghasilkan pendapatan dari penayangan iklan. Contoh: Google, Facebook.
- Model Bisnis Freemium: menawarkan layanan gratis dan berbayar. Contoh: Spotify, Dropbox(Setiawan et al., 2024).

Berdasarkan Target Pelanggan

- B2C (Business to Consumer): menjual produk/jasa ke pelanggan individu. Contoh: [e-commerce](#), retail.
- B2B (Business to Business): menjual produk/jasa ke pelanggan korporat. Contoh: software enterprise, logistik.
- B2G (Business to Government): menjual produk/jasa ke pemerintah. Contoh: contractor, IT services.

## Contoh Tipologi Model Bisnis



Berikut ini adalah beberapa contoh tipologi model bisnis beserta contoh perusahaannya:

### 1. E-Commerce

Perusahaan menjual produk secara online ke pelanggan melalui website atau aplikasi. Contoh: Tokopedia, Bukalapak, Shopee.

### 2. Subscription

Perusahaan menawarkan produk/layanan berlangganan dengan penagihan berkala. Contoh: Netflix, Spotify, Xbox Game Pass.

### 3. On-Demand

Perusahaan menyediakan layanan on-demand yang bisa diakses kapan saja. Contoh: Gojek, Grab, Traveloka.

### 4. Dropshipping

Perusahaan menjual produk tanpa perlu menyimpan stok dengan mengambil barang dari supplier. Contoh: SaleStock, Indoprinting, ModalRasa.

### 5. Freemium

Perusahaan menawarkan layanan gratis dan berbayar secara bersamaan. Contoh: Spotify, Dropbox, Slack.

### 6. Iklan

Perusahaan menghasilkan pendapatan dari penayangan iklan ke pengguna. Contoh: Google, Facebook, Youtube.

### 7. Aggregator

Perusahaan menggabungkan produk/layanan dari beberapa penyedia jasa. Contoh: Traveloka, Bukalapak, JD.ID.

### Kesimpulan

Tipologi model bisnis membantu kita memahami berbagai jenis model bisnis yang ada beserta kelebihan dan kekurangannya. Dengan mempelajari tipologi model bisnis, kita bisa memilih

model yang paling cocok untuk bisnis kita dan menganalisis peluang pasarnya. Beberapa contoh tipologi model bisnis yang populer saat ini antara lain e-commerce, subscription, on-demand, dropshipping, freemium, iklan, dan aggregator.

Daftar Pustaka:

<https://readmore.id/tipologi-model-bisnis/>

JOGIYANTO. (2024). *SISTEM INFORMASI MANAJEMEN* (4th ed.). Universitas Terbuka.

Setiawan, Hariyono, Z., Sigitta, R. C., Fitriyanto, R., Phan, I. K., & Suprayitno, D. (2024). *Pengantar Sistem Informasi: Konsep Dasar dan Aplikasi Praktis*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

**HAK ASASI MANUSIA DI ERA GLOBALISASI**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**ARTIKEL**

**MUHAMMAD IRHAM MAULA**

**054084858**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**SISTEM INFORMASI**

**SEMARANG**

**2024**

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah di Indonesia merupakan bentuk desentralisasi pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan secara mandiri. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah lokal diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik, mengelola potensi lokal secara efektif, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Namun, di era globalisasi, tantangan otonomi daerah menjadi semakin kompleks. Globalisasi membawa perubahan besar dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang bagi daerah untuk mengakses teknologi, investasi, dan pasar internasional. Di sisi lain, daerah juga menghadapi tantangan seperti ketimpangan pembangunan, erosi budaya lokal, dan ketergantungan pada investasi asing.

Artikel ini bertujuan untuk membahas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah di era globalisasi dan menawarkan strategi yang relevan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Definisi Otonomi Daerah**

Otonomi daerah merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pembangunan daerah berdasarkan potensi lokal. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi menciptakan peluang bagi daerah untuk menggali sumber daya secara mandiri dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Dalam teori desentralisasi yang dikemukakan oleh Rondinelli (1981), otonomi daerah didasarkan pada konsep pembagian kewenangan secara adil antara pusat dan daerah. Sementara itu, Cheema dan Rondinelli (1983) menegaskan bahwa desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik melalui pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal (Dayat & Anwarudin, 2020).

### **Globalisasi sebagai Tantangan dalam Otonomi Daerah**

Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang memengaruhi berbagai sektor, termasuk pemerintahan daerah. Menurut Giddens (1990) dalam bukunya *The Consequences of Modernity*, globalisasi membawa perubahan yang cepat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dalam konteks otonomi daerah, globalisasi membuka peluang bagi daerah untuk mengakses teknologi baru,

pasar global, dan investasi asing. Namun, dampaknya juga menciptakan tantangan seperti meningkatnya persaingan global, ketimpangan pembangunan, dan kehilangan identitas budaya lokal (Tambun, 2022).

### Konsep Good Governance dalam Otonomi Daerah

Good governance menjadi kerangka penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi menjadi pedoman dalam mengelola pemerintahan daerah. Menurut UNDP (1997), good governance adalah suatu proses pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang melibatkan aktor-aktor dari berbagai sektor, termasuk masyarakat sipil (Dayat & Anwarudin, 2020).

Di Indonesia, konsep good governance sering dikaitkan dengan upaya pemberantasan korupsi di tingkat lokal. Laporan dari Transparency International (2022) menunjukkan bahwa tingkat korupsi di daerah sering kali lebih tinggi dibandingkan pusat, sehingga menjadi hambatan utama dalam pengelolaan otonomi daerah yang efektif (Mulyaningsih, 2022).

### Ketimpangan Antar Daerah sebagai Dampak Globalisasi

Ketimpangan pembangunan antar daerah menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Daerah-daerah yang memiliki akses infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang baik cenderung lebih maju dibandingkan daerah tertinggal. Fenomena ini sering disebut sebagai development disparity. Dalam konteks globalisasi, ketimpangan ini dapat diperburuk oleh perbedaan kemampuan daerah dalam menarik investasi asing dan mengelola sumber daya lokal (Kholik, 2020).

### Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Otonomi Daerah

Pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah. Daerah yang mampu memanfaatkan potensi sumber daya alamnya secara berkelanjutan cenderung lebih berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, tantangan muncul ketika pengelolaan sumber daya alam tidak didasarkan pada prinsip keberlanjutan, sehingga menimbulkan konflik lingkungan dan sosial (Bahasoan et al., 2024).

## **PEMBAHASAN**

### 1. Dampak Positif Globalisasi terhadap Otonomi Daerah

Globalisasi telah membuka peluang besar bagi daerah untuk mengembangkan potensi ekonominya. Daerah yang mampu memanfaatkan peluang ini dapat mengakses investasi asing, teknologi canggih, dan pasar internasional. Misalnya, daerah dengan sektor pariwisata yang maju seperti Bali telah berhasil menarik wisatawan asing, memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, teknologi digital memungkinkan

pemerintah daerah untuk memperluas layanan publik secara online, sehingga pelayanan menjadi lebih efisien dan transparan.

Namun, tidak semua daerah mampu merespons globalisasi dengan baik. Daerah tertinggal yang memiliki infrastruktur minim cenderung kesulitan menarik investasi. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antara daerah maju dan daerah tertinggal semakin melebar.

## 2. Tantangan Ekonomi

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di era globalisasi adalah meningkatkan daya saing ekonomi. Daerah harus mampu mengelola sumber daya alamnya secara efisien dan berkelanjutan, namun dalam praktiknya, banyak daerah menghadapi keterbatasan, seperti kurangnya tenaga kerja terampil, rendahnya kualitas pendidikan, dan lemahnya infrastruktur.

Globalisasi juga memperkenalkan persaingan global, di mana produk-produk daerah harus bersaing dengan produk impor. Misalnya, produk pertanian lokal sering kalah bersaing dari segi harga dan kualitas dibandingkan dengan produk impor yang lebih murah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan pusat untuk melindungi sektor-sektor strategis melalui kebijakan subsidi, peningkatan kapasitas SDM, dan promosi produk lokal.

## 3. Tantangan Sosial dan Budaya

Era globalisasi membawa pengaruh budaya asing yang masif, seperti gaya hidup, makanan, dan media sosial, yang dapat mengancam keberlangsungan budaya lokal. Contohnya adalah generasi muda yang lebih tertarik pada budaya pop internasional dibandingkan tradisi lokal. Jika tidak diantisipasi, hal ini dapat menyebabkan erosi identitas budaya lokal.

Pemerintah daerah perlu mengadopsi kebijakan pelestarian budaya, seperti mendukung kegiatan seni tradisional, melibatkan masyarakat lokal dalam festival budaya, dan mempromosikan warisan budaya melalui teknologi digital. Selain itu, pendidikan berbasis kearifan lokal dapat menjadi solusi untuk memperkuat identitas budaya generasi muda (Ristanti, 2015).

## 4. Tantangan Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang buruk menjadi salah satu hambatan besar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Korupsi, birokrasi yang lamban, dan kurangnya transparansi sering kali menghambat program pembangunan daerah. Data dari Transparency International menunjukkan bahwa korupsi di tingkat daerah masih menjadi masalah serius di Indonesia.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah perlu menerapkan prinsip good governance, seperti transparansi anggaran, pengawasan masyarakat, dan reformasi birokrasi. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan korupsi, seperti melalui sistem e-budgeting dan e-procurement(Suharjono, 2014).

## 5. Ketimpangan Antar Daerah

Ketimpangan pembangunan antar daerah adalah masalah yang telah lama dihadapi Indonesia, dan globalisasi memperparah kondisi ini. Daerah yang memiliki akses ke pasar internasional, pelabuhan, dan infrastruktur yang baik cenderung lebih berkembang dibandingkan daerah yang terpencil. Sebagai contoh, wilayah Jawa dan Bali memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan wilayah Indonesia timur(Lintang Prabowo & M Tenku Rafli, 2022).

Pemerintah pusat harus memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan ini melalui kebijakan afirmatif, seperti alokasi anggaran yang lebih besar untuk daerah tertinggal, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan akses pendidikan serta kesehatan.

## 6. Peluang dalam Era Digitalisasi

Globalisasi juga membawa era digitalisasi yang memberikan peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan daya saingnya. Teknologi digital memungkinkan daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif, seperti e-commerce, pariwisata berbasis teknologi, dan aplikasi layanan publik. Pemerintah daerah yang inovatif dapat memanfaatkan teknologi ini untuk memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan transparansi, dan menarik perhatian investor asing.

Misalnya, penggunaan platform digital untuk memasarkan produk UMKM lokal telah membantu banyak daerah meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Selain itu, teknologi GIS (Geographic Information System) dapat digunakan untuk mengelola sumber daya alam secara lebih efektif dan mendukung perencanaan pembangunan berbasis data.



## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Otonomi daerah di Indonesia menghadapi tantangan besar di era globalisasi, meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, dan tata kelola pemerintahan. Ketimpangan pembangunan antar-daerah, ketergantungan pada investasi asing, serta erosi budaya lokal menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian khusus.

### **Saran**

1. Peningkatan Kapasitas SDM Lokal: Pemerintah daerah harus menyediakan pelatihan bagi aparatur agar mampu menghadapi perubahan global.
2. Kolaborasi Antar Tingkatan Pemerintah: Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk mengurangi ketimpangan pembangunan melalui distribusi anggaran yang adil.
3. Pemanfaatan Teknologi Digital: Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperkuat transparansi pemerintahan.
4. Pelestarian Budaya Lokal: Pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung pelestarian budaya, seperti festival budaya dan promosi produk lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 43. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119>
- Dayat, D., & Anwarudin, O. (2020). Faktor-Faktor Penentu Partisipasi Petani dalam Penyuluhan Pertanian Era Otonomi Daerah Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 13(2), 167. <https://doi.org/10.33512/jat.v13i2.9865>
- Kholik, S. (2020). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(1), 56. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i1.1023>
- Lintang Prabowo, & M Tenku Rafli. (2022). Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 20–28. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.56>
- Mulyaningsih, R. (2022). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(2), 296–309. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art6>
- Ristanti, Y. D. (2015). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, 2(2), 115–122.
- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19). <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>
- Tambun, S. (2022). Peningkatan Kemampuan Melakukan Riset Kualitatif dengan Menggunakan Software NVivo 12 PLus di LAN Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Samarinda. *Jurnal Pemberdayaan Nusantara*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.52447/jpn.v1i2.5663>